

## **BAB III**

### **PROSES DEMOKRATISASI DI MYANMAR**

#### **A. Perkembangan Politik di Myanmar**

Myanmar<sup>42</sup> yang memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya (Inggris) pada 4 Januari 1948 adalah sebuah negara dengan letak geografis yang amat strategis. Letaknya berbatasan langsung dengan lima negara tetangga, yakni dengan China di sebelah utara, dengan Laos di sebelah timur, Thailand sebelah tenggara, Bangladesh sebelah barat dan dengan India di sebelah barat laut. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan lima negara tersebut tentu Myanmar harus membina hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik bisa terbina apabila kondisi politik ekonomi di dalam negeri Myanmar relatif baik dan lebih terbuka. Artinya, apabila Myanmar tidak dihadapkan dengan masalah kehidupan politik dalam negeri sekarang ini yang memiliki banyak tekanan dari pemerintahan junta militer tentu hubungan ekonomi dan politik dengan negara tetangga akan bisa berjalan lebih maju dan terbuka.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Penggunaan nama Myanmar dipakai karena nama tersebut resmi terdaftar sebagai salah satu anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, diakses melalui [www.un.org/home/member\\_state](http://www.un.org/home/member_state). Diakses pada Sabtu 16 Februari 2013.

<sup>43</sup> Awani Irewati, Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi, selengkapnya di

Kondisi peta geografis Myanmar yang berdekatan dengan negara-negara tetangga secara umum masih menyisakan beberapa masalah yang sesungguhnya dipicu oleh kondisi dalam negeri Myanmar sendiri. Pergolakan antara junta militer dan sejumlah kelompok etnis Myanmar banyak menyita perhatian Myanmar sehingga menghambat kelangsungan pembangunan kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan Myanmar di bawah junta militer dengan dua kendali, yakni Dewan Pembangunan Dan Perdamaian Negara (*State Peace And Development Council*) yang dipegang oleh Jendral Besar Than Shwe dan seorang Perdana Menteri bernama Letnan Jenderal Soe Win. Meski Myanmar memiliki seorang Perdana Menteri dalam praktiknya kehidupan bernegara berada di bawah kendali kekuasaan militer. Dengan sistem pemerintahan demikian otomatis tak ada satupun kekuatan oposisi yang eksis berhadapan dengan kekuatan pemerintah junta militer.<sup>44</sup>

Myanmar merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya seperti minyak, mineral-mineral serta batu perhiasan berharga, namun Myanmar merupakan negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Walau merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang cukup rendah, Myanmar bukanlah sebuah negara yang lemah

karena Myanmar memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.<sup>45</sup>

Myanmar dahulu dikenal bernama Burma, perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada 18 juni 1989. Perubahan nama negara menjadi Myanmar ditujukan untuk menghilangkan kesan rasial yang melekat pada nama Burma.<sup>46</sup> Sejak kemerdekaan dari kolonialisme Inggris di tahun 1948 Myanmar terus menerus berada dalam keadaan dan situasi negara tidak menentu, seperti terjadinya beberapa kudeta militer dalam lima dekade belakangan ini, masalah hak asasi manusia, masalah pertumbuhan ekonomi sampai masalah kemanusiaan saat Myanmar terkena topan Nargis di tahun 2008.

Perekonomian Myanmar tampak kurang maju dengan tingkat inflasi ketiga tertinggi di dunia, yakni sekitar 15-17 % per tahun. Kegiatan ekspor dan impor berlangsung dibawah pengendalian dan kontrol junta militer. Bisa ditebak kegiatan perdagangan internasional Myanmar berada pada tingkat yang rendah, dan sebagai konsekuensi dari tingkat perdagangan

---

<sup>45</sup> Myanmar sebagai negara *Failed State* selengkapnya di | <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf>. Diakses pada Rabu 31 Oktober 2012.

<sup>46</sup> Dinamika Politik dan Demokrasi Myanmar selengkapnya di | <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/206613027/BAK%20II.pdf>

internasional yang begitu dibatasi tersebut, pemasukan bagi devisa negara juga amat terbatas.<sup>47</sup>

Banyak perkembangan politik progresif terjadi di Myanmar dua tahun belakangan ini, antara lain pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan diizinkan Partai National League for Democracy (NLD) mengikuti pemilu sela 2010. Presiden Thein Sein, meskipun menduduki jabatan karena penunjukan rezim militer dan pemilu tidak sah pada 2010, tampaknya melaksanakan reformasi secara sungguh-sungguh. Presiden ini melepaskan banyak tahanan politik, dan membuka ruang yang cukup untuk diskusi dan aktivitas politik. Walaupun aspek kebebasan telah dibuka, perkembangan itu hanyalah satu langkah bagi proses transisi demokrasi yang arahnya belum pasti. Konstitusi masih memberi kekuasaan penuh kepada rezim militer yang mengendalikan Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) untuk memegang semua struktur kekuasaan negara. Reformasi konstitusi, yang penting untuk mengurangi kekuasaan rezim itu, baru mulai dibahas Agustus mendatang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Tingkat inflasi itu dikemukakan oleh pengamat politik Myanmar dari Selandia Baru, Alfred Oehler dalam seminar "*Recent Development in Burma*" CSIS, Jakarta 20 Juli 2005. Lihat lebih lanjut di [http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4107518\\_1829-8001.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4107518_1829-8001.pdf). Diakses pada Selasa 30 Oktober 2012.

<sup>48</sup> Dr Budi Setiyono MPolAdmin, dosen FISIP Undip, penasihat politik Aung San Suu Kyi dan Partai NLD Myanmar.

Banyak sekali masalah menghadang proses demokratisasi di negara itu. Beberapa persoalan yang menonjol adalah kekuatan militer yang secara internal terpecah menjadi pendukung dan penentang demokrasi, warisan dendam dari represi politik, birokrasi yang menindas, perampasan dan pengekangan ekonomi, serta pemberontakan politik dan bersenjata dari beberapa wilayah. Yang paling menakutkan adalah negara itu menghadapi konflik etnik yang akut. Konflik itu telah lama menjadi penyakit yang membusuk, tidak terselesaikan dengan baik selama beberapa dekade. Penanganan represif dengan metode serampangan oleh pemerintah menyebabkan dendam di antara etnis-etnis yang bertikai. Dendam itu utamanya ditujukan kepada etnis Burma yang oleh etnik lain dituduh mendominasi pemerintahan secara tidak fair.<sup>49</sup>

Tantangan internal selain itu, konflik juga rentan terjadi antarpemeluk agama. Sebagaimana telah terjadi kerusuhan antara kelompok muslim dan Buddha di negara bagian Rakhine, yang dipicu masalah sepele. Sama dengan yang terjadi di negara lain, tantangan demokratisasi di Myanmar berkuat pada dua arah simultan, yaitu distribusi kekuasaan horizontal (demokratisasi pada sistem politik) dan desentralisasi vertikal melalui otda yang lebih besar bagi negara-negara bagian. Hal ini tentu saja sangat sulit. Jika

... .. desentralisasi melandani

keberhasilan transisi demokrasi. Ketika Indonesia mengakhiri pemerintahan otoriter tahun 1998, banyak orang mengkhawatirkan kemampuannya menangani dua hal itu sekaligus. Indonesia bisa dibidang menghadapi masalah internal yang jauh lebih rumit tapi dapat menyelesaikan transisi demokrasi dengan cukup baik. Bila Myanmar dapat belajar dari pengalaman Indonesia, keberhasilan mereka dalam menjalankan proses transisi demokrasi adalah bukan hal yang mustahil.<sup>50</sup>

#### **B. Munculnya Pemerintahan Junta Militer**

Permasalahan politik, hukum, ekonomi dan keamanan yang kompleks dan tidak stabil serta rentannya pemerintahan sipil mengakibatkan militer berinisiatif untuk terjun dalam pemerintahan negara. Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang dan negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Meluasnya peran militer dalam porsi pemerintahan memiliki faktor-faktor tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Ulf Sundhaussen yang mengatakan penyebab intervensi militer terbagi dalam dua faktor, Faktor internal : *Pertama*, perwira-perwira intervensionis didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusional. *Kedua*, intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. *Ketiga*,

kemahiran professional di kalangan militer menyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil, *Keempat*, intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira yang haus wibawa dan kuasa.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yang terdiri dari : *Pertama*, intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. *Kedua*, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik. *Ketiga*, kelompok sipil dianggap tidak mampu dalam melakukan modernisasi ekonomi. *keempat*, terjadinya disintegrasi nasional.<sup>51</sup>

Negara yang terletak dikawasan Asia Tenggara yang juga merupakan anggota organisasi regional ASEAN ini memiliki rezim pemerintahan militer yang dikenal dengan nama *The State Peace And Development Council* (SPDC). *The State Peace And Development Council* merupakan perubahan dari *State Law And Order Restoration Council* (SLORC) sejak 18 September 1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta

---

<sup>51</sup> Ulf Sundhaussen "Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI" LP3ES, Jakarta, 1986, H 440-473, Dikutip dari Ikrimah, "Peranan ASEAN

militer oleh jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962.<sup>52</sup>

Semenjak berkuasa rezim militer sudah banyak terjadi aksi demonstrasi dari rakyat Myanmar baik yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh agama. Para demonstran mengecam kekuasaan militer di kursi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil. Aksi demonstrasi ini disikapi oleh pemerintah junta militer dengan tindak kekerasan dan tidak sedikit memakan korban. Demonstrasi terbesar sepanjang sejarah berkuasanya militer di Myanmar terjadi pada Agustus 1988. Demonstrasi ini dikenal dengan Generasi 88 yang melibatkan banyak pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawanan terhadap Ne Win dalam menuntut sistem demokrasi.<sup>53</sup>

Demokrasi yang dimotori oleh para biksu ini merupakan reaksi dari melambungnya harga minyak. Keterlibatan para biksu yang sudah berlangsung sejak perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Inggris, hingga terlibat dalam pemberontakan mahasiswa adalah merupakan simbol perlawanan masyarakat

---

<sup>52</sup> Profil Myanmar tersedia di <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990563>. Diakses pada Selasa 30 Oktober 2012.

<sup>53</sup> Dinamika Politik dan Demokrasi di Myanmar, lihat lebih lanjut di



Myanmar.<sup>54</sup>

Perjuangan rakyat Myanmar melalui aksi demonstrasi ini berhasil membuat Jenderal Ne win sebagai pemimpin junta militer mengundurkan diri. Pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung. Junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus sebagai *State Law And Order Restoration Council* (SLORC). Dibawah kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar, menjadi lebih terbuka dengan negara lain terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Pada 23 April 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin SLORC dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya.

Di awal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama *State Law And Order Restoration Council* menjadi *State Peace And Development Council*. Pada masa pemerintahan Jenderal Than Shwe kebijakan dalam negeri Myanmar sangat otoriter dan menindas hak-hak masyarakat sipil. Demokrasi di Myanmar merupakan demokrasi yang mengalami kebekuan dimana ada penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya

---

<sup>54</sup> Myanmar kenang Demokrasi 1988 selengkapnya di <http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/08/08/08/08513757/Myanmar.Ken>

memberikan kebebasan serta peran utama kepada sipil tidak ada. Junta militer yang mengambil alih kekuasaan mendominasi bahkan mengendalikan semua sistem pemerintahan.<sup>55</sup>

### C. Perkembangan Demokrasi di Myanmar Sebelum dan Sesudah Pemilu Nasional Tahun 1990

Pasca penolakan hasil pemilu nasional Myanmar tahun 1990 dunia internasional menjadikan Myanmar sebagai perhatian utama dalam masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Amerika Serikat pada Januari 2007 mengajukan Resolusi kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menggugat pemerintahan militer Myanmar agar segera dibawa ke Dewan Keamanan PBB<sup>56</sup>.

Inisiatif untuk memulai perkembangan demokrasi dan implementasi langkah-langkah guna membentuk pemerintahan demokratis dimulai pada tahun 2003, ketika Myanmar menyatakan akan memulai peta jalan menuju demokrasi (*Road Map to Democracy*) ditahun 2004. Janji tersebut dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Myanmar saat itu, Win Aung dalam sebuah forum internasional di Bangkok yang diberi nama "*Bangkok Process*".<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Dinamika Politik dan Demokrasi di Myanmar, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> Awani Irewati *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Peran ASEAN Terhadap Demokratisasi di Myanmar, tersedia di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613027/BAB%20I.pdf>. Diakses pada Jum'at 2 November 2012.

*Road Map To Democracy* adalah tujuh tahapan kebijakan yang telah ditetapkan *The State Peace And Development Council* (SPDC) sejak tanggal 30 Agustus 2003, yaitu:<sup>58</sup>

1. Menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional
2. Implementasi langkah-langkah yang diperlukan guna membentuk pemerintahan demokratis
3. Penyusunan konstitusi baru oleh Konvensi Nasional
4. Pelaksanaan konstitusi baru lewat referendum
5. Penyelenggaraan Pemilu
6. Pembentukan Parlemen
7. Pemilihan Kepala Negara dan pejabat lainnya oleh parlemen.

Pada Tanggal 10 Oktober 2006, pemerintahan junta militer Myanmar menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional yang tertunda sejak tahun 1996, sebagai langkah pertama dari 7 (tujuh) langkah *Road Map To Democracy*. Konvensi ini bertujuan untuk membuat draft konstitusi baru. Setelah menyelenggarakan konvensi nasional, sebagai langkah kedua, akan dilaksanakan proses yang diperlukan agar sistem demokrasi semakin terpadu.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Robert H Aylor, *Power Sharing The Key to Peace In Myanmar*. The Strait Times, 25 Agustus 2004.

<sup>59</sup> Tujuh Peta Jalan Demokrasi Myanmar. Tersedia di <http://bataviase.co.id>

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 pemerintah Myanmar melaksanakan referendum konstitusi baru, dimana hasilnya adalah 92,49 % rakyat Myanmar yang memiliki hak pilih menyatakan setuju atas konstitusi baru tersebut. Konstitusi baru yang terdiri dari 15 Bab dan 457 Pasal itu meliputi pengaturan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang termasuk pengaturan Dasar Negara, Bentuk Negara, Kepala Negara, Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Pertahanan Warga Negara, Pemilihan Umum, Partai Politik, Pasal Kondisi Darurat, Prosedur Amandemen Konstitusi, Lambang Negara, Pasal Peralihan, dan Pasal Umum.<sup>60</sup>

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Myanmar tentang “*Road Map to Democracy*” yang ditetapkan sejak tanggal 30 Agustus 2003 oleh Perdana Menteri Myanmar saat itu, yaitu Jenderal Khin Nyunt, pada 7 November 2010 Myanmar telah melaksanakan langkah kelima dalam tujuh langkah menuju pemerintahan Myanmar yang demokratis, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum legislatif yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru.<sup>61</sup>

Pada tanggal 8 Desember 2010, melalui surat kabar pemerintah *New Light Of Myanmar*, *The Union Election Commission* atau Komisi Pemilihan Umum Myanmar

---

<sup>60</sup> Peran ASEAN Terhadap Demokratisasi di Myanmar. *Loc. Cit*

<sup>61</sup> *Ibid.*

mengumumkan data-data utama sekaligus hasil akhir perhitungan pemilu 2010. Data-data utama tersebut meliputi jumlah daerah pemilihan, jumlah pemilih yang menggunakan haknya, jumlah surat suara yang sah, jumlah surat suara yang tidak sah, jumlah kandidat (dari partai) yang terpilih, serta jumlah kandidat independen yang terpilih.<sup>62</sup>

Pengumuman ini merupakan keputusan resmi dari KPU Myanmar mengenai hasil akhir perhitungan pemilu, sekaligus sebagai tanda berakhirnya pemilu 2010 yang berlangsung dengan tertib dan lancar. Jalannya pemilu telah mendorong situasi kehidupan perpolitikan yang positif di Myanmar, dimana masyarakat Myanmar menjadi lebih aktif dan terbuka terhadap berbagai kegiatan politik.

Dalam pemilihan umum pada November 2010 yang diperebutkan oleh 37 partai politik dan tanpa tampilnya oposisi *National League for Democracy* (NLD), USDP memenangkan mayoritas 883 kursi parlemen (76,5 persen) dari total 1.154 pada tiga tingkatan, di mana 259 kursi pada majelis perwakilan, 129 kursi majelis kebangsaan dan 495 kursi wilayah atau parlemen negara bagian. Selain itu, 25 persen kursi parlemen di tingkat masing-masing dipegang oleh wakil-wakil militer yang

dinominasikan secara langsung tanpa melalui pemilihan menurut konstitusi 2008.<sup>63</sup>

Perubahan politik yang terjadi di Myanmar sejauh ini membuahkan hasil yang diapresiasi positif oleh dunia internasional. Walaupun Pemilu 2010 yang dimenangkan oleh *Union Solidarity and Development Party (USDP)* mendapat protes dari partai oposisi, *National League for Democracy (NLD)*, namun dibawah pemerintahan Thein Sein yang diangkat menjadi Presiden pasca kemenangan pemilu 2010, perubahan-perubahan besar terus terjadi mulai dari pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi, hingga pembukaan diri Myanmar pada dunia internasional yang salah satunya ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton.<sup>64</sup>

Bagi Myanmar, kunjungan Hillary Clinton membawa arti besar bagi proses terbukanya Myanmar terhadap politik internasional karena selama ini Myanmar selalu menutup diri terhadap kunjungan asing. Langkah penting dalam pembukaan Myanmar terhadap politik internasional dilakukan pada awal tahun 2012 melalui pembebasan sejumlah 651 tahanan politik yang terdiri

---

<sup>63</sup> Presiden Thein Sein Terpilih Kembali Sebagai Pemimpin Partai Berkuasa Myanmar lihat di <http://beritasore.com/2012/10/18/presiden-thein-sein-terpilih-kembali-sebagai-pemimpin-partai-berkuasa-myanmar/> Diakses pada Jumat 2 November 2012.

<sup>64</sup> Khanisa Krisman Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar tersedia di <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar>. Di akses pada Rabu 31 Oktober 2012.

atas pelajar, pemimpin minoritas, pejuang demokrasi, dan tahanan lainnya, yang telah dipenjara sejak tahun 2004. Pembebasan sejumlah tahanan politik ini mengobati kekecewaan para aktivis politik yang tidak puas atas amnesti yang diberikan terhadap 32 tahanan politik pada saat hari kemerdekaan Myanmar beberapa hari sebelumnya.<sup>65</sup>

Pembebasan para tahanan politik semakin memantapkan langkah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi. Selama ini, Myanmar, dibawah kekuasaan junta militer yang selalu menggunakan kekerasan dalam menangani setiap upaya yang berusaha menggoyang kekuasaan, bahkan hal tersebut dilakukan tanpa mempedulikan siapa pun yang menjadi lawannya termasuk kalangan pendeta Budha.

Pemerintah Myanmar sendiri telah secara resmi mengumumkan kemenangan partai *National League for Democracy* pada pemilu April 2012, USDP hanya memperoleh satu kursi pada Majelis Kebangsaan dari 45 kursi parlemen terbuka, sedangkan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi mendapatkan 43 kursi.<sup>66</sup> Pengakuan pemerintah ini menghapuskan ketegangan atas terulangnya sejarah pemilu nasional tahun 1990 dimana junta militer tidak mengakui hasil pemilu yang sudah dilaksanakan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Presiden Thein Sein Terpilih Kembali Sebagai Pemimpin Partai Berkuasa Myanmar *Loc. Cit.*

Pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dimulai ketika masa pemerintahan Jenderal Saw Maung<sup>67</sup> pada tahun 1988. Kekacauan dalam pengelolaan ekonomi dan penindasan politik yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu menyebabkan demonstrasi meluas di seluruh negeri. Pada tahun 1989, SLORC lalu mendeklarasikan hukum darurat militer setelah berbagai aksi protes semakin meluas. Selain itu SLORC juga mengadakan pemilu untuk meligitimasi kekuasaan dan memberi jalan bagi kemenangan *National Unity Party* (NUP) yang dibentuknya untuk menguasai parlemen.<sup>68</sup>

Pemilu pada akhirnya diputuskan akan berlangsung pada 27 Mei 1990 dan menjelang penyelenggaraan pemilu tersebut 200 partai politik melakukan registrasi termasuk partai NLD. NLD dengan cepat berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat Myanmar dan berhasil memosisikan diri sebagai partai paling populer karena mampu menggalang dukungan dari dua juta penduduk Myanmar selama masa kampanye. Namun berkaitan dengan pernyataan Aung San Suu Kyi pada sebuah wawancara pada masa kampanye bahwa partainya akan menyerukan boikot nasional terhadap proses ekonomi, maka Aung San Suu Kyi dan U Tin Oo selaku pimpinan partai *National League for Democracy* ditangkap

---

<sup>67</sup> Setelah melakukan kudeta pada jenderal Dr. Maung Maung.

<sup>68</sup> Philip S. Robertson, Jr., "Burma" Vol.2, no 43 Agustus 1997, John Hopkins School of Advance International Studies, mengutip dari <http://www.foreignpolicy>



dan dikenakan tahanan rumah oleh pemerintah Myanmar pada tanggal 28 Juli 1989.<sup>69</sup>

Dengan ditahannya dua tokoh demokrasi tersebut, pemerintahan junta militer berharap bahwa pendukung partai *National League for Democracy* pada pemilu tersebut akan menurun sehingga tidak mampu memperoleh suara mayoritas. Namun dugaan tersebut ternyata salah, karena partai *National League for Democracy* justru memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada 27 Mei 1990 dengan meraih 82% suara pemilih atau 392 kursi dari 458 kursi yang ada di parlemen nasional. Sementara *National Unity Party* (NUP) yang didukung pemerintahan junta militer hanya memperoleh 3 % atau 10 kursi parlemen.<sup>70</sup>

Selanjutnya pemerintahan militer dibawah kendali SLORC menolak mengakui hasil pemilu yang mencatat kemenangan oposisi partai *National League for Democracy* dan secara sistematis melemahkan posisi *National League for Democracy* dengan melakukan penahanan rumah terhadap sejumlah pimpinan partai

---

<sup>69</sup> Pelanggaran HAM dan Demokrasi yang Terjadi Pada Pemerintahan Junta Militer Myanmar tersedia di <http://www.library.upnvi.ac.id/pdf/s1hi09/204613008/bab2.pdf>. Diakses pada Jumat 2 November 2012

<sup>70</sup> Noerani Chandrawati, "Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar" Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk kriteria Baru. *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol.2 No.3 Tahun 2006.

tersebut.<sup>71</sup> Penolakan pemerintah junta militer terhadap hasil pemilu nasional Myanmar menjadikan permasalahan demokrasi di Myanmar menarik perhatian publik internasional, banyak organisasi maupun negara-negara yang peduli terhadap isu domestik Myanmar. Tuntutan dan desakan dari beberapa negara ASEAN bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat semakin intens dilakukan.

#### **D. Hubungan Antara Masyarakat Sipil dan Pemerintahan Junta Militer**

Sejak Myanmar<sup>72</sup> memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya pada tahun 4 Januari 1948 U Nu adalah Perdana Menteri Myanmar yang pertama dan memimpin pemerintahan Myanmar selama 8 tahun dan mengundurkan diri pada tahun 1956 dan pada 4 tahun sesudahnya terpilih kembali meski pada akhirnya dipaksa mundur oleh jenderal Ne Win pada tahun 1962. Sejak saat itu pemerintah junta militer dibawah Ne Win mulai berkuasa dan memegang kekuasaan di Myanmar. Proses pengambilan kekuasaan yang tanpa sedikitpun melibatkan proses demokrasi didalamnya melahirkan dan membentuk pola kekuasaan yang bersifat tirani.<sup>73</sup>

Sejak pemerintahan junta militer berkuasa banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar antara lain

---

<sup>71</sup> Pelanggaran HAM dan Demokrasi yang Terjadi Pada Pemerintahan Junta Militer Myanmar *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Dahulu bernama Burma dengan nama resmi Union of Burma.

<sup>73</sup> Awani Irewati *Loc. Cit.*

adalah penindasan terhadap suku-suku minoritas, kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, dan terjadinya kekerasan demonstran dalam demonstrasi tahun 1988. Selain itu kehidupan rakyat Myanmar yang serba sulit terlihat sangat kontras dengan kehidupan para petinggi militer Myanmar dan para bawahannya. Fasilitas yang diperoleh anggota militer lebih banyak daripada rakyat biasa. Anggota militer mendapatkan fasilitas perumahan, kesehatan dan makanan dengan porsi yang lebih besar dari rakyat.

Hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintahan junta militer yang tidak harmonis tersebut mengakibatkan berbagai keterpurukan yang dirasakan oleh rakyat Myanmar sehingga mendorong rakyat Myanmar melakukan pemberontakan terhadap rezim pemerintah yang berkuasa. Pada tahun 1988 gerakan pemberontakan dipelopori oleh aktivis mahasiswa yang kemudian disokong oleh warga sipil dan ribuan kaum biksu budha.

Akan tetapi, desakan dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil selama ini tidak terlalu memberikan perubahan yang maksimal terhadap kondisi negara dan semakin banyaknya korban dalam proses demokrasi menyebabkan timbulnya reaksi dari pihak internasional seperti negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Peringatan atas tindakan junta militer itupun dilakukan oleh organisasi internasional, ASEAN dan PBB. Jika

toleransi kepada pemerintah Myanmar, negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat memilih cara yang lebih keras dalam mengancam kekerasan yang seringkali dilakukan junta militer kepada rakyatnya. Sejak pemberontakan di tahun 1988 yang diikuti dengan penolakan hasil pemilu 1990, kebanyakan bantuan dan investasi pihak asing ke Myanmar berkurang.

Selain itu Pelanggaran HAM dan pemerintahan yang tidak demokratis di Myanmar membuat Myanmar mendapat perhatian dari lembaga lembaga swadaya masyarakat internasional yang mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap demokrasi dan perlindungan hak sipil salah satunya adalah Open Society Foundations. Kebuntuan proses demokrasi di Myanmar membuat Open Society Foundation melaksanakan program-program yang menunjang dan memfasilitasi terjadinya konsolidasi demokrasi yang lebih baik di Myanmar. Selain itu alasan utama OSF berperan aktif dalam proses perkembangan demokrasi di Myanmar adalah karena perjuangan Aung San Suu Kyi menentang rezim militer yang mengundang simpati dunia internasional.

Dalam peta perpolitikan Myanmar, pemilihan umum memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pertumbuhan demokrasi, selama ini segala kebijakan negara selalu berada dibawah kontrol pemerintah junta militer. Oleh karena itu pemilu diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan

negara. Terselenggaranya pemilu 2010 di Myanmar tidak serta merta memberikan ruang pada transformasi demokrasi yang terjadi di negara tersebut. ASEAN dan PBB merupakan dua pihak eksternal yang memandang positif pada pemilu yang digelar di Myanmar. Dalam pemilu 2010 pergolakan tetap terjadi karena pihak oposisi dan pengamat politik menyatakan bahwa kecurangan masih terjadi<sup>74</sup>. Tetapi terlepas dari pergolakan internasional maupun domestik tentang proses demokrasi di Myanmar, pembebasan Aung San Suu Kyi dan diadakannya pemilu nasional tahun 2010 telah membawa semangat baru bagi tumbuhnya demokrasi di Myanmar.

---

<sup>74</sup> *Khanisa Krisman Loc. Cit*